

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENUTUPAN JALAN TANPA IZIN

Mohamad Faisal / D 101 11 105

Pembimbing :

I : Achmad Allang. S.H., M.H

II : Awaliah. S.H., MH

ABSTRAK

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya. Sering kita jumpai penutupan jalan di wilayah kota Palu yang dilakukan oleh masyarakat, untuk kepentingan masyarakat itu sendiri, contoh seperti pelaksanaan Road Race dan pesta kawin, hal ini tentu saja mengganggu kepentingan umum dan tidak sesuai dengan tujuan jalan yang diatur dalam pasal 3 UU No 38 Tahun 2004, dengan demikian timbul masalah dalam hal pelaksanaan penegakan hukum karena dalam pelaksanaannya sulit diterapkan sebagai akibat terdapatnya budaya hukum masyarakat, hal ini memerlukan waktu yang cukup panjang sampai penegakan tersebut dapat langsung ditegakkan

Kata Kunci : Penggunaan Jalan tanpa izin

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita. Transportasi adalah suatu kegiatan untuk memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dan fasilitas yang digunakan untuk memindahkannya.

perkotaan, sedangkan angkutan barang sangat penting untuk menunjang perekonomian.

Transportasi mempunyai karakteristik dan atribut yang menunjukkan arti dan fungsi spesifiknya. Fungsi utamanya adalah

Perpindahan atau pergerakan manusia merupakan hal yang penting dipikirkan khususnya di daerah terutama di kota-kota besar di

untuk menghubungkan manusia dengan tata guna lahan. Pada kenyataannya,

Indonesia pembinaan dan pengelolaan jalan tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini ditandai dengan adanya kemacetan lalu lintas akibat pertumbuhan lalu lintas yang pesat dan terbaurnya peranan arteri, kolektordan lokal pada ruas-ruas jalan yang ada, sehingga mempercepat penurunan kondisi dan pelayanan perjalanan.

Hal ini menunjukkan belum adanya kesesuaian persepsi dalam penentuan peranan dan fungsi serta administrasi jalan di wilayah perkotaan, yang berakibat pada inefisiensi penggunaan dan pembinaan jalan dalam hal ini adalah jalan perkotaan.

Jalan merupakan sarana transportasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak karena digunakan oleh seluruh masyarakat di segala lapisan dalam meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan secara efektif dan efisien untuk memenuhi rasa aman dan tertib bagi pengguna jalan, maka perlu melakukan pengaturan pemanfaatan ruas jalan dan pengguna jalan oleh masyarakat dengan

memberikan izin pemanfaatan ruas jalan dan penggunaan jalan.

Dalam Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, pembinaan bidang lalu lintas dan angkutan jalan di laksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait sebagai berikut:

1. Urusan pemerintahan di bidang prasarana jalan, oleh kementrian yang bertanggungjawab di bidang jalan.
2. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementrian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
3. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan, oleh pemerintahan yang bertanggungjawab di bidang industri.
4. Urusan pemerintahan dibidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh pemerintah yang

bertanggungjawab di bidang teknologi, dan

5. Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap pembina bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terlihat lebih jelas dan transparan sehingga penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Jaringan jalan dan pengoperasian lalulintas di Indonesia telah mencapai kondisi yang memprihatinkan dengan semakin padatnya jumlah penduduk serta kondisi ekonomi masyarakat yang juga semakin meningkat.

Penyimpangan-penyimpangan pemanfaatan jaringan jalan yang dipicu

oleh tidak terkendalinya tata guna lahan dan pemanfaatan jalan untuk kegiatan-kegiatan yang bukan untuk pergerakan manusia ataupun barang memberikan dampak negatif yang berdampak pada kehidupan masyarakat terutama masyarakat pengguna jalan. Fungsi jalan sebagai sarana perpindahan kendaraan, orang, barang sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang No 38 Tahun 2004 Tentang Jalan telah dikesampingkan dan cenderung untuk diabaikan.

Keadaan ini tentu saja tidak bisa didiamkan begitu saja, hal ini mengingat jalan merupakan salah satu sarana masyarakat luas dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, berbagai peraturan dan perundang-undangan telah banyak dikeluarkan dengan tujuan menciptakan keamanan dan ketertiban para pengguna jalan dalam berlalulintas. Salah satu bentuk penyimpangan penggunaan jalan adalah penutupan ruas-ruas jalan untuk kepentingan pribadi seperti pelaksanaan pesta yang menggunakan ruas jalan sebagai tempat parkir, pendirian tenda-tenda dan lain sebagainya. Penggunaan ruas jalan untuk kegiatan pesta memerlukan izin

dari pihak yang berwenang sehingga penggunaan ruas jalan tersebut tidak menyebabkan terjadinya kekacauan lalu lintas yang berimbas kepada kemacetan. Penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi terkadang membuat masyarakat sebagai pengguna jalan sangat kesal karena jalan yang biasanya dilalui untuk beraktifitas ditutup karena ada kegiatan pesta, yang mau tidak mau membuat pengguna jalan harus memutar kendaraannya dan mencari jalan lain. Kejadian penutupan jalan yang sering ditemui pada jalan umum yang ditutup sebagian untuk resepsi perkawinan, sering menimbulkan kekesalan masyarakat dan ditambah lagi apabila penutupan jalan tersebut tidak disertai dengan adanya pemberitahuan yang dapat berupa rambu pengalihan jalur lalu lintas atau bentuk informasi lainnya.

Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali pengguna jalan di perhadapkan dengan adanya sarana jalan yang ditutup karena hajatan yang dilakukan oleh warga. Apakah itu pesta perkawinan, sunatan bahkan lomba balap motor. Menghadapi kondisi yang demikian kadang pengguna jalan merasa kesal terhadap penutupan jalan

dan harus mengambil jalur yang jauh, larangan penutupan ruang manfaat jalan ini di atur dalam undang-undang No 38 tahun 2004 pasal 12 ayat (1) dan mempunyai ketentuan pidana yang di atur dalam pasal 63 ayat (1). Akan tetapi sanksi yang telah di atur dalam Undang-undang No 38 Tahun 2004 seperti tidak membuat setiap orang / badan hukum takut, padahal untuk mendapatkan izin pemanfaatan jalan sangat mudah, dan di atur dalam Peraturan Daerah Kota Palu No 12 Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Penggunaan Jalan. Penutupan jalan ini tentu saja tidak sesuai dengan tujuan penyelenggaraan, adapun tujuan penyelenggaraan yang di atur dalam Undang-undang No 38 Tahun 2004 Pasal 3 sebagai berikut :

1. Mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan.
2. Mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan.
3. Mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat.
4. Mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta

berpihak pada kepentingan masyarakat.

5. Mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi terpadu, dan
6. Mewujudkan pengusahaan jalan tol yang transparan dan terbuka.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi penegakan hukum terhadap penggunaan ruang manfaat jalan tanpa izin?
2. Apakah hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap penggunaan fasilitas jalan tanpa izin?

II. PEMBAHASAN

A. Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Ruang Manfaat Jalan Tanpa Izin

Berkaitan dengan masalah penegakan hukum, walau polemik hukum sejatinya tidak akan pernah berhenti sepanjang kehidupan manusia,

tetapi proses penegakan hukum juga harus menjadi bagian yang tidak kalah penting khususnya dalam pembahasan masalah penegakan hukum di Indonesia.¹

Suatu permasalahan sendiri adalah kondisi dalam peningkatan pelayanan hukum termaksud SDM (sumber daya manusia) yang berkualitas tidaklah cukup kalau hanya sekedar berpendidikan tinggi tanpa di barengi pendidikan yang berkualitas.

Penegakan hukum sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi nyata.²

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa

¹ Dr. H. Moh. Hatta, S.H, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*. Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hlm 29

² Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum, Bandung: Sinar Baru*, hlm. 24.

sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang³.

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini hubungannya dengan asas legalitas yang mana tidak ada suatu perbuatan

dapat dipidana melainkan telah di atur dalam undang-undang, maka bagi siapa melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sdah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya di tujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.⁴

Pada dasarnya penggunaan ruang manfaat jalan di perbolehkan tetapi harus mempunyai jalur alternatif dan mempunyai izin yang di keluarkan oleh pihak kepolisian.

Penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi seperti pendirian tenda untuk pelaksanaan pesta harus memperoleh izin dari pihak Kepolisian sebagai pejabat yang diberikan kewenangan untuk hal tersebut dan tindakan yang menggunakan jalan untuk kepentingan pribadi tanpa izin tentunya dapat disebut sebagai suatu bentuk pelanggaran yang dapat diberikan sanksi sebagai bentuk penghukuman, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-undang N0 38 Tahun 2004 Tentang

³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109

⁴ Andi Hamza, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001 hlm 15

Jalan merupakan bentuk pelanggaran lalu lintas yang dikategorikan ringan tetapi harus dipatuhi oleh masyarakat karena jika tindakan tersebut mengganggu ketertiban lalu lintas maka pihak Kepolisian dengan tegas akan melakukan teguran dan pembokaran yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja sebagai bentuk upaya paksa dalam melakukan penertiban lalu lintas.

Salah satu bentuk penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh Aparat Kepolisian adalah dengan memberikan teguran kepada setiap masyarakat yang melakukan pelanggaran maupun melakukan upaya paksa jika masyarakat tidak menghiraukan setiap peringatan yang telah diberikan oleh pihak Kepolisian.

Penerapan sanksi terhadap pelanggaran penggunaan ruang manfaat jalan tanpa izin di wilayah hukum Kota Palu belum berjalan efektif karena pihak Kepolisian masih kurang memberikan perhatian dalam permasalahan tersebut, terhadap setiap pelanggaran yang terjadi Kepolisian hanya menunggu apakah tindakan tersebut menimbulkan permasalahan lalu lintas atau adanya laporan dari

masyarakat yang menilai kegiatan tersebut mengganggu ketertiban lalu lintas. Khusus untuk Acara hajatan atau pernikahan mulai dari Januari 2016 pihak Kepolisian akan memberikan sanksi terhadap pengusaha tenda bukan lagi kepada pemilik hajatan atau pesta pernikahan,⁵ dan sanksi yang diberikan lebih rendah dari pada ketentuan Pasal 63 ayat 1 Undang-undang No 38 Tahun 2004. Tentu saja langkah ini tidak akan memberikan efek jera terhadap masyarakat yang akan menggunakan badan jalan.

B. Hambatan – Hambatan Dalam Proses Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto dalam bukunya menuliskan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum yaitu :

1. Faktor undang-undang.

Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu

⁵ Hasil Wawancara dengan IPDA. Timur Ambonia, KBO Lalu lintas, Kamis 13 September 2015

prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement* saja, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegak hukum.

Ruang lingkup dari penegakan hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum. Yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace*

maintenance. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas dibidang kehakiman, Kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan. Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum dengan mengutip pendapat J. E. Sahetapy yang mengatakan :

“Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan”.⁶

3. Faktor sarana atau fasilitas.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan

⁶<http://sarmyendrahendy.blogspot.co.id/2012/06/dalamrealita-kehidupan-bermasyarakat.html> diakses pada tanggal 4 Januari 2016

berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

4. Faktor masyarakat.
Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya.
5. Faktor kebudayaan
Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja di bedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang

menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materil. Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya, mencakup tatanan lembaga-lembaga, hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusanya maupun acara untuk penegakannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan.⁷

Dari Uraian diatas yang terdapat 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Adapun hambatan – hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap penutupan jalan tanpa izin adalah sebagai berikut :

1. Faktor Budaya

⁷ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, :Rajawali Pers 2013, hlm 11

Budaya Hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, penilaian, serta harapan masyarakat terhadap hukum. Jadi dengan kata lain, budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau bahkan disalahgunakan termasuk oleh penegak hukum itu sendiri. Hukum tampak melakukan sesuatu dan saling interaksi karenanya adanya tingkah laku dan tindakan manusia. Hukum itu sendiri tidak bisa bertindak laku. Bekerjanya hukum dalam masyarakat sangat bergantung pada tindakan manusia. Ketentuan-ketentuan hukum seringkali tidak dapat dilaksanakan karena tindakan manusia. Secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

2. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat kota Palu mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut. Tetapi tingkat kesadaran dan budaya hukum masyarakat yang masih rendah serta kurang respek terhadap hukum, hal inilah yang menjadi penghambat dalam proses penegakan hukum tentang penggunaan ruang manfaat jalan tanpa izin, yang mana masyarakat kota Palu dalam melakukan kegiatan baik itu pesta pernikahan

dan hajatan lainnya tidak membuat permohonan penutupan jalan. Upaya pihak kepolisian dalam membongkar paksa tenda yang terbangun di tengah jalan kadang mendapat perlawanan dari masyarakat yang menolak untuk ditertibkan.⁸

III. PENUTUP

1. KESIMPULAN

1. A. Penutupan jalan baik yang secara legal dan ilegal dapat mengganggu kepentingan umum serta menghambat aktifitas masyarakat dan membuat terganggunya fungsi jalan.

B. Implementasi penegakan hukum terhadap penutupan jalan tanpa izin tidak efektif karena pihak Kepolisian masih kurang memberikan perhatian dalam permasalahan tersebut, terhadap setiap pelanggaran yang terjadi Kepolisian hanya menunggu apakah tindakan tersebut

menimbulkan permasalahan lalu lintas atau adanya laporan dari masyarakat yang menilai kegiatan tersebut mengganggu ketertiban lalu lintas.

2. A. Penutupan jalan tanpa izin yang dilakukan masyarakat karena tidak memiliki lahan yang cukup luas sehingga melakukan penutupan jalan.

B. Faktor penghambat penegakan hukum dalam kasus pelanggaran penutupan jalan tanpa izin dipengaruhi faktor budaya masyarakat yang mana tingkah laku masyarakat dan tingkat kesadaran hukum masyarakat masih kurang.

II. SARAN

1. A. Dalam pemberian izin untuk menggunakan ruang manfaat jalan agar lebih diperhatikan jalan yang akan ditutup, apakah memiliki jalur alternatif atau tidak, karena kebanyakan jalur alternatif yang dilalui pengendaraan bermotor lebih kecil dari jalan yang akan ditutup, sehingga membuat macet dan menghambat aktifitas masyarakat

⁸ Hasil Wawancara dengan IPDA. Timur Ambonia, KBO Lalu lintas, Kamis 13 September 2015

B. Aparat penegak hukum harus lebih tegas dalam menangani masalah pelanggaran ini, memberikan sanksi yang telah diatur dalam Undang-undang agar memberikan efek jera kepada masyarakat yang melanggar, karena sanksinya lebih berat dari pada dilakukan pembongkaran pada acara hajatan dan acara-acara lainnya.

2. Melakukan pendekatan kepada masyarakat terhadap pentingnya kesadaran hukum agar menciptakan masyarakat yang patuh terhadap hukum karena hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk kedamaian dalam bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Andi Hamzah. *Asas – Asas Hukum Pidana*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2001).

Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung : Citra Aditya bakti. 2002).

Dr. H. Moh. Hatta, S.H, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*. Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2009,

Satjipto Rahardjo, , *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung : Sinar Baru, 1983).

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Rajawali, 1983)

B. UNDANG-UNDANG

Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang Tentang Jalan*. Jakarta. Sekretariat Negara

Republik Indonesia. 2009. *Undang-undang Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Jakarta. Sekretariat Negara

C. SUMBER LAINNYA

<http://sarmyendrahendy.blogspot.co.id/2012/06/dalamrealita-kehidupan-bermasyarakat.html>

BIODATA PENULIS



Nama : Mohamad Faisal
Tempat/Tanggal Lahir : Palu, 05 September 1992
Alamat : Jl. Merpati Lrg V No 5A Palu
E-mail : mohamad_faial82@yahoo.co.id
No Hp : 082349888078